

PENGARUH BELANJA LANGSUNG DAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI (Survei Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah)

Andrie Novandy¹, Anhulaila M. Palampanga dan Ridwan²

andrie.novandy@yahoo.co.id

¹Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako

²Dosen Pengajar Program Studi magister Manajemen pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

This research's aims are: 1) to define and analyze the influence of direct expenditure and budget surplus on economic growth; 2) to define and analyze the influence of direct expenditure on economic growth; 3) to define and analyze the influence of budget surplus on economic growth. The research involves ten regencies and one city that are purposively selected. The research type is descriptive analysis with quantitative approach. The data is analyzed with multiple linear regressions. Based on the study results, the research concludes that: 1) direct expenditure and budget surplus simultaneously have positive and significant influence on economic growth with R_{square} of 0.2840 or 28,4 % on the significant influence on economic growth with t_{value} of 2,797 on the significant level of 0,008; 3) budget surplus partially has insignificant influence on economic growth with t_{value} of 0,927 on the significant level of 0,359.

Keywords: *direct expenditure, budget surplus, and economic growth*

Sesuai dengan amanat undang - undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Penerapan otonomi daerah yang luas saat ini bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi ekonomi yang ada sehingga dapat memacu peningkatan aktivitas perekonomian di daerah yang pada akhirnya meningkatkan perekonomian nasional. Penerapan otonomi daerah yang telah digariskan dalam UU No. 33/2004, mensyaratkan adanya suatu perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam rangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan

daerah, serta pemerataan antar daerah secara proporsional, adil, demokratis dan transparan.

Pendanaan pembangunan daerah yang terstruktur terdapat pada belanja yang dilakukan daerah untuk dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

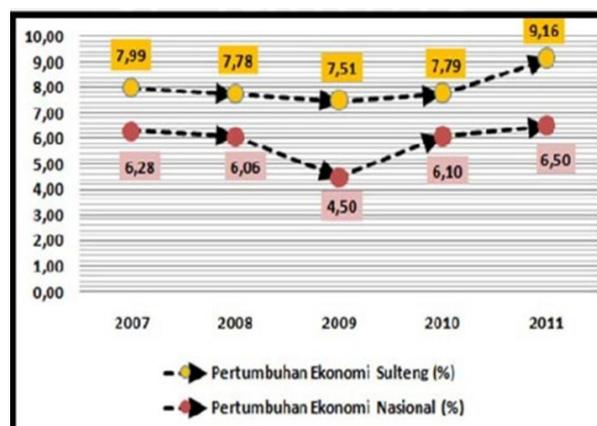
Untuk mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah yang kondusif salah satu komponen yang diandalkan adalah belanja daerah. Keberadaan anggaran belanja

daerah apabila dibandingkan dengan investasi swasta nilainya relatif kecil meskipun demikian dana tersebut mempunyai peranan strategis, karena sasaran penggunaannya untuk membiayai pembangunan di bidang sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran usaha swasta dan pemenuhan pelayanan masyarakat.

Belanja daerah menurut kelompok belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung yang merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan maupun dalam melaksanakan pembangunan daerah. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja yang terkait secara langsung dengan program adalah belanja langsung. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat dan peningkatan pelayanan umum dengan titik berat pada pengembangan sarana dan prasarana ekonomi, serta penyediaan fasilitas pelayanan dasar. Sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Sumber pendanaan lainnya untuk alokasi belanja penyediaan berbagai fasilitas publik adalah penerimaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006, SiLPA merupakan sisa dana yang diperoleh dari aktualisasi penerimaan serta pengeluaran anggaran daerah selama satu periode. Bentuk penggunaan SiLPA ada dua, yakni: (1) untuk melanjutkan kegiatan yang belum selesai dikerjakan pada tahun sebelumnya (luncuran) dan (2) membiayai kegiatan baru yang tidak teranggarkan dalam APBD murni.

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu proses pertumbuhan output perkapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi juga bersangkut paut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Hal ini menandakan bahwa dalam jangka panjang kesejahteraan tercermin pada peningkatan output perkapita yang sekaligus memberikan banyak alternatif dalam mengkonsumsi barang dan jasa serta diikuti oleh daya beli masyarakat yang semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk daerah, baik ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota. Dapat dikatakan, bahwa pertumbuhan menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan.



Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2007-2011

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2007 sebesar 7,99%, setahun kemudian mengalami penurunan yaitu pada tahun 2008 tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi 7,78% dan tahun 2009 sebesar 7,51%. Pada tahun 2010 kembali mengalami peningkatan sehingga menjadi 7,79% dan peningkatan terbesar adalah pada tahun 2011 yaitu sebesar 9,16%.

Pertumbuhan ekonomi seyogyanya dapat memperlihatkan trend yang meningkat dan mantap dari tahun ke tahun, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan guna mempercepat perubahan struktur perekonomian daerah menuju perekonomian yang berimbang dan dinamis. Pertumbuhan ekonomi juga diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan di bidang-bidang lainnya sekaligus sebagai kekuatan utama pembangunan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengatasi ketimpangan sosial ekonomi..

Berdasarkan fenomena diatas, dirumuskan masalah sebagai berikut:

- 1). Apakah belanja langsung dan SiLPA secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah?
- 2). Apakah belanja langsung secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah?
- 3). Apakah SiLPA secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah?

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode kuantitatif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberi gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial dengan memusatkan pada aspek-aspek tertentu dan sering menunjukkan pengaruh antara berbagai variabel (Nasution, 1982:41 dalam Riduwan, 2012:65). Selanjutnya menurut Sugiyono (2010:7) metode kuantitatif adalah metode ilmiah/*scientific* karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris,

obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga disebut metode *discovery* karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan iptek baru. Metode ini disebut juga metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh ciri-ciri variabel yang diteliti yaitu belanja langsung, SiLPA sebagai variabel independen dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel dependen dengan menguji teori-teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Penelitian ini akan mengidentifikasi bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah yaitu 10 Kabupaten 1 Kota sehingga berjumlah 11 Kabupaten/Kota. Berikut daftar nama Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah yang menjadi populasi dalam penelitian ini.

Tabel 1. Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Sebagai Populasi

NO	NAMA DAERAH
1	<u>Kabupaten Banggai</u>
2	<u>Kabupaten Banggai Kepulauan</u>
3	<u>Kabupaten Morowali</u>
4	<u>Kabupaten Poso</u>
5	<u>Kabupaten Donggala</u>
6	<u>Kabupaten Toli-Toli</u>
7	<u>Kabupaten Buol</u>
8	<u>Kabupaten Parigi Moutong</u>
9	<u>Kabupaten Tojo Una-una</u>
10	<u>Kabupaten Sigi</u>
11	<u>Kota Palu</u>

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota di Sulawesi Tengah

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah selama 4 (empat) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2012 – 2014

No	Pemerintah Daerah	Tahun			
		(Dalam Jutaan Rupiah)			
		2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)
1	Banggai Kepulauan	1,660,817.00	1,792,018.00	1,921,658.00	2,056,526.00
2	Banggai	6,824,381.00	7,556,759.00	8,282,837.00	8,714,523.00
3	Morowali	4,101,979.00	5,011,999.00	6,207,874.00	6,262,465.00
4	Poso	3,843,870.00	4,134,768.00	4,451,023.00	4,795,337.00
5	Donggala	5,662,326.00	6,044,337.00	6,459,246.00	6,862,568.00
6	Tolitoli	3,573,671.00	3,855,321.00	4,161,217.00	4,429,416.00
7	Buol	2,709,916.00	2,907,932.00	3,120,657.00	3,448,812.00
8	Parigi Moutong	7,709,224.00	8,249,944.00	8,838,207.00	9,448,812.00
9	Tojo Una-una	2,650,565.00	2,854,273.00	3,058,544.00	4,003,166.00
10	Sigi	4,003,166.00	4,276,605.00	4,583,672.00	4,880,994.00
11	Pahu	9,462,177.00	10,295,685.00	11,241,131.00	12,240,389.00

Sumber: LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah

2. Perkembangan Realisasi Belanja langsung Kabupaten/kota di-Sulawesi Tengah

Perkembangan alokasi belanja langsung Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah selama 4 (empat) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 3. Perkembangan Realisasi Belanja langsung Kabupaten/kota di-Sulawesi Tengah Tahun 2012 – 2014

No	Pemerintah Daerah	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Tolitoli	231,044,550,124.00	219,329,124,555.00	316,473,352,008.09	337,814,592,630.00
2	Banggai Kepulauan	232,165,370,992.00	260,713,511,955.00	308,577,667,076.00	233,363,732,689.00
3	Morowali	244,972,150,716.00	322,736,257,400.00	410,094,472,985.00	235,027,506,716.00
4	Tojo Una-una	254,932,287,957.00	298,352,235,375.00	327,376,558,388.00	416,070,136,963.59
5	Banggai	259,155,386,574.00	304,110,306,544.00	425,542,330,623.07	532,723,538,507.02
6	Sigi	264,061,968,695.48	291,658,364,475.53	318,865,591,403.69	367,778,142,340.60
7	Palu	264,232,525,483.50	304,128,735,065.00	489,328,841,200.00	601,981,582,503.00
8	Poso	271,029,498,197.00	297,746,550,649.00	322,544,190,614.47	433,323,759,094.00
9	Buol	272,939,471,927.08	202,836,713,650.14	269,620,334,283.20	306,896,133,511.49
10	Parigi Moutong	298,266,961,020.00	343,706,881,711.95	405,493,891,654.04	449,417,185,980.00
11	Donggala	336,428,570,679.31	312,050,593,617.25	390,015,193,786.53	407,812,219,495.22

Sumber: LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah

3. Perkembangan Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten/kota di-Sulawesi Tengah

Kabupaten/kota di-Sulawesi Tengah selama 4 (empat) tahun terakhir sebagai berikut:

Perkembangan realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Tabel 4. Perkembangan Realisasi SiLPA Kabupaten/kota di-Sulawesi Tengah Tahun 2012 – 2014

No	Pemerintah Daerah	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Banggai Kepulauan	929,636,578.41	30,068,059,392.98	50,008,588,681.18	74,338,907,251.36
2	Banggai	55,142,966,203.78	85,819,099,430.49	93,643,488,360.26	81,346,515,708.17
3	Morowali	1,315,247,956.73	20,887,966,177.29	9,717,697,840.69	24,297,393,295.01
4	Poso	12,376,848,566.93	37,300,796,203.81	20,373,698,673.36	36,509,531,634.71
5	Donggala	70,834,758,104.55	59,771,327,599.12	52,287,956,425.65	48,271,743,173.58
6	Tolitoli	21,882,357,124.24	24,696,335,937.64	37,181,031,862.80	45,807,297,641.21
7	Buol	8,252,378,022.87	2,814,198,202.26	6,782,425,175.02	37,307,248,897.19
8	Parigi Moutong	16,162,613,892.56	68,597,052,915.95	67,090,536,748.50	51,422,189,378.08
9	Tojo Una-una	25,814,710,084.63	47,718,436,190.00	35,675,295,727.56	47,540,235,317.73
10	Sigi	25,518,252,995.74	58,196,854,294.39	32,099,808,075.72	36,064,245,100.64
11	Palu	13,331,761,209.56	37,935,224,245.25	62,933,767,748.16	80,630,538,326.86

Deskriptif Statistik

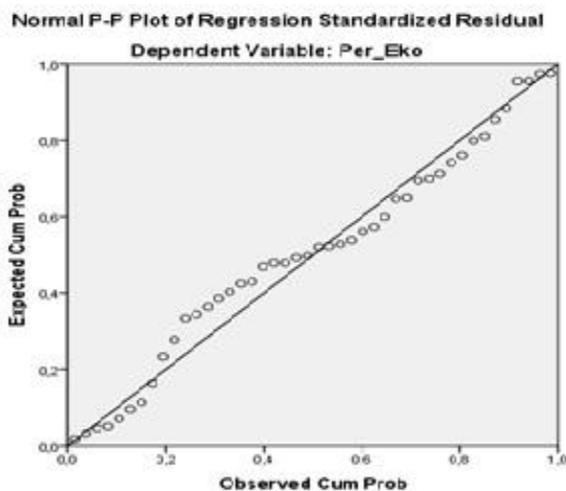
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Bidang Bina Keuangan dan Evaluasi (BKE) Kabupaten/Kota pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah. Data penelitian ini berupa hasil laporan realisasi keuangan (target dan alokasi anggaran) pemerintah 11 (sebelas) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), Kabupaten Banggai, Kabupaten Morowali, Kabupaten Poso, Kabupaten Donggala, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Buol, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Kabupaten Tojo Una-Una (Touna), Kabupaten Sigi, dan Kota Palu, periode 2011-2014, sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 44 (empat puluh empat) observasi. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Belanja

langsung, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan pertumbuhan ekonomi.

Sebelum melakukan analisis regresi linear berganda, dilakukan dahulu uji asumsi klasik sebagai berikut:

a) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji salah satu asumsi dasar analisis regresi berganda, yaitu variabel-variabel independen dan dependen harus berdistribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2005:53). Untuk menguji apakah data-data yang dikumpulkan berdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan metode grafik dan statistic. Metode grafik yang handal untuk menguji normalitas data adalah dengan melihat normal probability plot dan histogram.



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan gambar 2 diatas, nampak bahwa sebaran (pencaran) data berada di sekitar garis diagonal dan tidak ada yang terpecah jauh dari garis diagonal, sehingga asumsi normalitas dapat dipenuhi.

b) Uji Multikolinearitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya permasalahan multikolinieritas dalam model regresi, maka dapat dilihat dari nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan tolerance yang merupakan uji yang sering digunakan untuk melihat ada tidaknya multikolinieritas dalam model regresi. Nilai tolerance menunjukkan variasi variabel independen dijelaskan oleh variabel independen lainnya dalam model regresi dengan mengabaikan variabel dependen. Sedangkan nilai VIF merupakan kebalikan dari nilai tolerance. Jadi semakin tinggi korelasi antar variabel independen, maka semakin rendah nilai tolerance (mendekati 0) dan semakin tinggi nilai VIF. Pedoman umum (rule of thumb) untuk batasan nilai VIF dan tolerance agar model regresi terbebas dari persoalan multikolinieritas adalah di bawah 10 untuk VIF dan di atas 10% untuk tolerance (Ghozali, 2005:107). Berdasarkan hasil dengan bantuan komputer program SPSS versi 21.0 maka nilai VIF dan tolerancedapat

dilihat pada Tabel 4.23, dinyatakan bahwa model regresi dalam penelitian ini terbebas dari persoalan atau problem multikolonieritas, karena nilai VIF dan tolerance masing-masing di bawah dan di atas cut off value yang ditetapkan.

Tabel 5. Uji Multikolinieritas dengan VIF dan Tolerance

Nb.	Variatel Penelitian	Tolerance	VIF
1	BelanjaLangsung	0,708	1,413
2	SiLPA	0,708	1,413

Sumber: Output SPSSversi 21.0

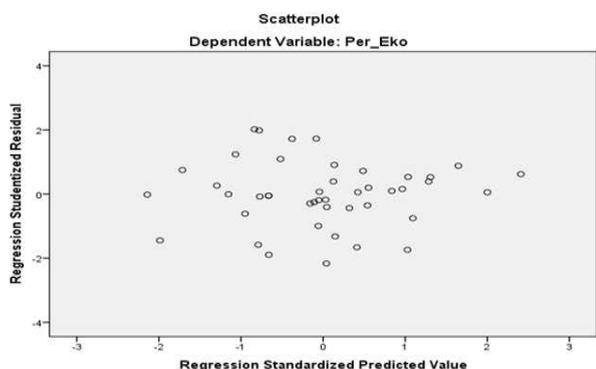
c) Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala autokorelasi digunakan uji Durbin Watson. Pada model regresi yang dihasilkan menunjukkan nilai DW sebesar 1,946, nilai tersebut lebih besar dari $Du=1,6120$ dan nilai DW lebih kecil dari nilai $4-Du$ yaitu sebesar $(4-1,6120=2,388)$. Berdasarkan perhitungan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terdapat gejala autokorelasi.

d) Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas bukan heteroskedastisitas (Ghozali, 2005:109).

Adapun salah satu cara untuk mendeteksi adanya heterokedastisitasadalah dengan melihat penyebaran dari titik-titik (varian residual) melalui grafik scatterplot. Berikut merupakan grafik Scatterplot yang dihasilkan dari komputer program SPSS 21.0



Gambar 3. Grafik Scatterplot

Gambar 3 menunjukkan bahwa titik-titik pada grafik *scatterplot* tidak membentuk pola yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit, grafik tersebut dapat

disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas).

Hasil Regresi

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh belanja langsung dan SiLPA terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tengah.

Regresi linier berganda berfungsi untuk menganalisis keterkaitan dan keterhubungan diantara dua atau lebih variabel penelitian yang berbeda, yaitu variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas). Hasil analisis regresi linier berganda disajikan pada tabel 4.5 berikut :

Tabel 6. Hasil Perhitungan Regresi Linier Berganda

No.	Variabel Independen	Variabel dependen (Y= Pertumbuhan Ekonomi)			
		Koefisien Regresi (B)	Hasil Uji t	Probabilitas (Sig t)	R Parsial
1	Constanta (a)	3,060	-	-	-
2	Belanja Langsung (X1)	0,921	2,797	0,008	0,400
3	SiLPA (X2)	0,074	0,927	0,359	0,143
<i>Multipel Regresi</i> = 0,533		F Hitung = 8,117			
<i>R Square</i> = 0,284		Signifikansi = 0,001			
<i>Adjusted R Square</i> = 0,249					

Sumber : Data yang diolah menggunakan SPSS v.21.0

Tabel diatas menunjukkan nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,249. Hal ini berarti bahwa variasi variabel belanja langsung dan SiLPA dapat menjelaskan variasi variabel pertumbuhan ekonomi Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tengah sebesar 24,90%, sedangkan sisanya sebesar 75,10% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam penelitian (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Perimbangan dan Belanja Tidak Langsung).

Nilai koefisien korelasi (Multiple R) adalah sebesar 0,533. Nilai tersebut menunjukkan hubungan yang positif antara variasi variabel belanja langsung dan SiLPA

dapat menjelaskan variasi variabel pertumbuhan ekonomi Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tengah yaitu sebesar 53,30.

Hasil pengolahan data pada tabel 4.28 dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2$$

$$Y = 3,060 + 0,921 X_1 + 0,074 X_2$$

Persamaan Regresi Linier diatas menunjukkan bahwa variabel independen memiliki arah pengaruh positif terhadap variabel dependen. Hasil perhitungan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Koefisien regresi konstanta (a) sebesar 3,060. Nilai konstanta ini menunjukkan bahwa apabila variabel belanja langsung dan SiLPA naik sebesar 3,060 maka

tingkat pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar jumlah tersebut

2. Koefisien regresi beta (b_1) sebesar 0,921. Nilai koefisien regresi b_1 ini memberikan arti ditemukannya hubungan positif antara belanja langsung dengan pertumbuhan ekonomi, dimana setiap peningkatan belanja langsung sebesar 1, maka akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,921 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.
3. Koefisien regresi beta (b_2) sebesar 0,074. Nilai koefisien regresi b_2 ini memberikan arti ditemukannya hubungan positif antara SiLPA dengan pertumbuhan ekonomi, dimana setiap peningkatan SiLPA sebesar 1, maka akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,074 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.

Hasil Pengujian Hipotesis

Untuk membuktikan hipotesis I, apakah belanja langsung dan SiLPA berpengaruh signifikan (bersama-sama) terhadap variabel terikat maka digunakan uji F.

Berdasarkan hasil uji anova diperoleh F hitung sebesar 8,117 dengan tingkat probabilitas sebesar 0.001 (signifikan). Syarat uji yang digunakan adalah apabila pada taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) nilai probabilitas (*probabilitas value*) koefisien regresi lebih kecil daripada 0,05 maka hipotesis alternatif (H_a) diterima. Berdasarkan komputasi data dengan bantuan SPSS diperoleh nilai probabilitas untuk koefisien regresi sebesar 0.001 atau lebih kecil daripada 0,05. Oleh karena itu, hipotesis null (H_0) dalam penelitian ini ditolak dan sebaliknya hipotesis alternatif (H_a) diterima, berarti kedua variabel bebas (belanja langsung dan SiLPA) secara bersama-sama mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tengah.

Uji t dilakukan untuk menguji signifikansi konstanta pada setiap variabel

bebas atau melakukan uji secara parsial (individu) untuk mengetahui pengaruh setiap variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil uji t dari dua variabel bebas yang dimasukkan dalam model regresi terlihat bahwa :

- a. Syarat uji yang digunakan adalah: apabila pada taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) nilai probabilitas (*probabilitas value*) koefisien regresi X_1 lebih kecil daripada 0,05 maka hipotesis alternatif 2 diterima. Berdasarkan komputasi data dengan bantuan SPSS diperoleh nilai probabilitas untuk koefisien regresi belanja langsung (X_1) sebesar 0,008 atau lebih kecil daripada 0,05, oleh karena itu, hipotesis null (H_0) dalam penelitian ini ditolak dan sebaliknya hipotesis alternatif (H_a) diterima. Nilai koefisien determinasi variabel belanja langsung (X_1) sebesar 0,440, memberikan arti bahwa variabel belanja langsung memberikan pengaruh sebesar 44% terhadap pertumbuhan ekonomi.
- b. Syarat uji yang digunakan adalah: apabila pada taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) nilai probabilitas (*probabilitas value*) koefisien regresi X_2 lebih kecil daripada 0,05 maka hipotesis alternatif 2 diterima. Berdasarkan komputasi data dengan bantuan SPSS diperoleh nilai probabilitas untuk koefisien regresi X_2 sebesar 0,359 atau lebih besar daripada 0,05 oleh karena itu, hipotesis null (H_0) dalam penelitian ini diterima dan sebaliknya hipotesis alternatif (H_a) ditolak. Nilai koefisien determinasi variabel SiLPA (X_2) sebesar 0,146 memberikan arti bahwa variabel SiLPA memberikan pengaruh sebesar 14,6% terhadap pertumbuhan ekonomi.

1. Pengaruh Belanja Langsung dan SiLPA terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa ada pengaruh belanja langsung dan SiLPA terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Sulawesi Tengah. Hal ini

menunjukkan bahwa turun naiknya pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi oleh besarnya belanja langsung dan SiLPA suatu daerah. Semakin meningkat belanja langsung dan SiLPA, maka semakin meningkat pula pertumbuhan ekonomi pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.

Belanja langsung daerah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah lebih didominasi oleh belanja modal yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semua pengeluaran atau belanja yang digunakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan daerah itu sendiri sehingga ikut membantu tercapainya pertumbuhan ekonomi yang baik. Belanja langsung dan SiLPA yang digunakan oleh pemerintah dipergunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Pengeluaran-pengeluaran ini bersifat investasi dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Belanja langsung misalnya pada belanja modal dan Sisa lebih anggaran tahun sebelumnya yang menjadi penerimaan pada tahun berjalan (SiLPA) merupakan sumber penerimaan internal Pemda yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan tahun berjalan, memiliki keterkaitan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dimulai dari pengalokasian alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti pembangunan infrastruktur, dianggap sangat penting bagi kelangsungan hidup perekonomian daerah. Kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana yang menjadi dasar pengalokasian belanja modal tersebut, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Jika sarana dan prasarana publik telah terpenuhi dan dianggap memadai untuk dipergunakan oleh masyarakat maka pelaksanaan aktivitas sehari-hari dapat berjalan secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pula pada tingkat produktivitas masyarakat yang semakin meningkat. Selain

itu infrastruktur yang memadai juga akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Semakin banyak investor yang menanamkan investasi di suatu daerah maka pertumbuhan ekonomi daerah juga akan ikut meningkat.

Begitupun dengan belanja pegawai, pertumbuhan ekonomi yang baik juga didukung oleh sumber daya manusia yang berpotensi pula. Dengan catatan penerimaan pegawai sebaiknya disesuaikan antara posisi yang dibutuhkan dengan latar belakang pendidikan pegawai tersebut serta gaji dan tunjangan yang dapat memenuhi standar hidup. Dengan adanya kesesuaian antara jabatan dengan latar belakang pendidikan maka akan menciptakan kinerja pegawai yang semakin baik sehingga pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat.

Sebaliknya, apabila posisi yang dibutuhkan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan maka kinerja pegawai akan menjadi buruk dikarenakan pegawai yang bersangkutan tidak memiliki pengetahuan mengenai apa yang dikerjakannya meskipun pemerintah telah membekali pegawai tersebut dengan pelatihan dan gaji serta tunjangan yang tinggi.

Sejalan dengan hasil tersebut, Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Stine (1994) dalam Darwanto dan Yustikasari (2006) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program pelayanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.

Namun pada kenyataannya, besarnya nilai belanja tidak sebanding dengan hasil akhir yang diperoleh. Hal ini terlihat dari masih tertinggalnya Kabupaten-Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tengah dengan kabupaten - kabupaten dan kota yang

terdapat di provinsi lain. Seperti pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran belanja modal merupakan sebuah proses yang sarat dengan kepentingan-kepentingan politis. Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun, adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam penyusunan proses anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat (Keefe, 2003).

2. Pengaruh Belanja Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Dari hasil uji parsial yang dilakukan terhadap variabel belanja langsung terhadap variabel pertumbuhan ekonomi pada pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tengah diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa variabel belanja langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

Hasil tersebut tidak terlepas dari adanya peran pemerintah dalam penggunaan belanja langsung secara tepat. Penggunaan belanja langsung secara tepat pada suatu daerah sesuai dengan tujuan yang diinginkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut pula. Seperti diketahui belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja pegawai merupakan belanja yang digunakan untuk membiayai upah atau honorarium para pegawai dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Belanja pegawai yang dialokasikan sebagai kompensasi untuk memacu pegawai dalam bekerja secara kreatif berdasarkan tugas, wewenang dan tanggung jawab ternyata mampu memotivasi pegawai dalam kepentingan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Belanja barang dan jasa merupakan belanja yang digunakan untuk pembelian barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Belanja barang dan jasa sangat berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Seperti perjalanan dinas. Perjalanan dinas dilaksanakan dengan tujuan untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain agar tertarik melakukan investasi. Apabila investasi terjalin dengan baik, akan berpengaruh pada perekonomian daerah tersebut menuju ke arah yang lebih baik.

Belanja modal merupakan belanja yang digunakan untuk membeli atau mengadakan atau membangun aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan. Tingginya belanja modal menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Belanja modal ini diyakini mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik. Tingginya belanja modal disebabkan pemerintah daerah di seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tengah masih memperhatikan kebutuhan masyarakatnya. Kegiatan masyarakat tidak terlepas dari sarana dan prasarana publik yang memadai. Oleh karenanya pemerintah daerah berupaya menyediakan sarana dan prasarana publik yang memadai dan layak digunakan dengan cara melakukan pembangunan infrastruktur seperti pembuatan jalan, irigasi, air bersih, gedung sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor-kantor dan lain sebagainya. Jika sarana dan prasarana publik tersebut telah terpenuhi dan layak digunakan oleh masyarakat dalam melaksanakan kegiatan mereka sehari-hari, kesejahteraan masyarakat pun akan tercipta dengan baik. Selain kesejahteraan masyarakat yang dapat tercipta dengan baik melalui sarana dan prasarana yang memadai, juga akan mendatangkan investor yang akan melakukan kerjasama melalui investasi sehingga ikut mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih

baik. Oleh sebab itu, pentingnya pembangunan infrastruktur di suatu daerah dalam menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang baik.

Kuncoro (2004) menyatakan bahwa pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan penambahan penduduk. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah daerah diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Pengaruh SiLPA terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa SiLPA berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya SiLPA pada pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah berpengaruh tidak signifikan terhadap naik turunnya pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hadi Utomo (2011) yang menyatakan bahwa SiLPA dalam perspektif kelembagaan berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Sisa lebih anggaran tahun sebelumnya yang menjadi penerimaan pada tahun berjalan (SiLPA) merupakan sumber penerimaan internal pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan tahun berjalan. Hampir seluruh daerah di Propinsi Sulawesi Tengah memiliki SiLPA. Padahal dalam anggaran yang telah ditetapkan, pemerintah daerah telah menetapkan akan terjadi defisit, dimana pendapatan daerah tidak dapat menutupi seluruh belanja daerah. SiLPA yang ada di

semua pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tengah dapat disebabkan karena beberapa faktor yaitu adanya pelampauan pendapatan daerah yang tidak terhitung dalam perhitungan anggaran. Serta adanya efisiensi belanja pemerintah yang terlalu jauh dari target yang ditetapkan. Besaran SiLPA yang dihasilkan oleh suatu daerah tidak dapat digunakan sebagai tolak ukur kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya SiLPA belum serta merta menunjukkan baiknya kinerja pemerintah daerah yang bersangkutan. Peningkatan SiLPA yang semakin tinggi dari tahun ke tahun juga dilakukan oleh pemerintah daerah dengan sengaja, karena semakin tinggi SiLPA maka pemerintah daerah termotivasi untuk melakukan investasi berbasis produktivitas di Bank Pembangunan Daerah yaitu Bank Sulteng, serta penyertaan modal agar hasilnya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah pada tahun anggaran berikutnya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Hasil analisa dan pembahasan mengenai pengaruh belanja langsung dan SiLPA terhadap pertumbuhan ekonomi pada pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tengah dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa belanja langsung dan SiLPA berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (survei pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah);
2. Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa belanja langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (survei pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah);
3. Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa SiLPA berpengaruh tidak

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (survei pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah).

Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran-saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan diketahui bahwa variabel independen yang mempunyai pengaruh namun tidak signifikan adalah variabel SiLPA. Diharapkan pemerintah daerah dari masing-masing kabupaten dan kota agar hendaknya lebih meningkatkan investasi sehingga SiLPA kedepannya diharapkan akan ikut meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah;
2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti variabel lain yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi selain variabel belanja langsung dan SiLPA, karena masih banyak terdapat variabel lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang tulus dan ikhlas penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Anhulaila M. Palampanga, M.S dan Prof. Dr. H. Ridwan, S.E., M.Si., AK., CA selaku pembimbing yang selalu sabar dan rela meluangkan waktunya untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian jurnal ini.

DAFTAR RUJUKAN

Abdullah, 2013. Defisit/Surplus dan SILPA dalam Anggaran Daerah ~ Apakah saling berhubungan? <http://syukriy.wordpress.com/2013/01/01/defisit-dan-surplus-dalam-anggaran-daerah-apakah-saling-berhubungan/>.

Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS, Badan*. Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Keefer, Philip & Stuti Khemani. 2003. *The Political Economy of Public Expenditures*. Background paper for WDR 2004: Making Service Work for Poor People. The World Bank.

Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta.

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Riduwan, 2012, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, Penerbit Alfabeta Bandung.

Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Gahalia Indonesia.

Sugiyono, 2010. *Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung. Alfabeta.

Utomo, Hadi. 2011. "Pengaruh SILPA dalam Perspektif Kelembagaan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur". Malang: *Karya Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang*. Volume 32: 2-12

Yustikasari, Yulia dan Darwanto. 2007. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal". Simposium Nasional Akuntansi X, 1 – 25.